
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Perang Suku Antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire, Papua Tengah Pada Tahun 2023-2025

Bintang Nurmaharani Tamimi^{1*}, Jian Aleyska Nufninu¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : Bintangtamimi10@icloud.com

Article History:

Received : 09-01-2026

Accepted : 16-01-2026

Keywords: Konflik Sosial;
Perang Suku; Kesbangpol;
Mediasi Konflik; Papua Tengah

ABSTRAK

Konflik sosial berbasis identitas suku masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas keamanan dan kohesi sosial di wilayah Papua, khususnya di daerah otonomi baru seperti Provinsi Papua Tengah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire dalam menangani konflik perang suku antara Suku Mee dan Suku Moni yang terjadi pada periode 2023–2024. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, serta pemberitaan media daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan strategis melalui pendekatan mediasi, komunikasi persuasif berbasis kearifan lokal, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan dan tokoh adat. Upaya tersebut terbukti mampu meredam eskalasi konflik, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong terciptanya perdamaian yang relatif berkelanjutan. Penanganan konflik yang mengedepankan dialog dua arah dan musyawarah adat menjadi kunci keberhasilan resolusi konflik di Kabupaten Nabire.

PENDAHULUAN

Konflik Adalah kondisi yang muncul Ketika terdapat perbedaan pendapat, pandangan, kebutuhan, atau kepentingan antar individu, kelompok, atau organisasi. Konflik biasanya terjadi dalam hubungan sosial dan interaksi manusia baik dalam skala kecil maupun besar dan konflik bisa terjadi dalam level yang berjenjang yaitu elit, menengah dan rakyat atau massa sehingga penanganannya harus berjenjang pula. Konflik juga memiliki beberapa jenis yang pertama konflik laten, yaitu konflik yang terjadi terus menerus karena ada hal yang tersembunyi dan tidak terselesaikan. Yang kedua konflik terbuka, konflik yang mengarah pada kekerasan fisik, mental, perampasan dan kehilangan harta benda. Dan yang ketiga konflik permukaan, konflik yang terjadi di tengah Masyarakat secara transparan antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediasi menjadi cara untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga untuk dapat membantu menyelesaikan konflik dengan komprehensif, tidak memihak dan diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Mediasi dilakukan dengan tujuan berupaya membantu menyelesaikan pertikaian yang Tengah berlangsung di Masyarakat. Penyelesaian harus memenuhi kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang berkonflik, sehingga harus bisa diterima semua pihak yang berkonflik (Hakiki & Angraini, 2022).

Konflik-konflik tersebut yang salah satunya adalah konflik terbuka menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) Adalah institusi pemerintah yang ada di setiap tingkatan pemerintahan di Indonesia, dimulai dari pusat, provinsi dan juga kabupaten atau kota. Kesbangpol memiliki fungsi strategis dalam mengkoordinasikan Upaya penyelesaian konflik, menjembatani berbagai kepentingan, dan juga mengintegrasikan nilai sosial dan budaya dengan kebijakan negara. Kesbangpol melakukan penyelesaian konflik untuk meskipun kesbangpol masih sering menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kelambatan birokrasi dan juga minimnya partisipasi masyarakat yang bersengketa, sehingga diperlukan strategi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan responsifitas dan efektivitas penyelesaian konflik seperti pada konflik di kabupaten Nabire, Papua Tengah (Tengah et al., 2023).

Konflik yang terjadi di Provinsi Papua Tengah khususnya Kabupaten Nabire bisa disebut sebagai konflik terbuka dimana Masyarakat adat masih mempertahankan praktik-praktik tradisional seperti perang ada sebagai bentuk penyelesaian konflik. Salah satu wilayah paling rentan terhadap konflik karena umumnya dipicu oleh kecemburuan sosial, pemahaman agama yang rendah dan sentimen SARA. Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan ibu kota di Nabire yang wilayahnya menjadi titik perhatian karena daerah wilayah ini dihuni oleh Masyarakat multi-etnis seperti suku Mee, Moni, Dani, Damal serta para Kelompok migran non-Papua. Keberagaman yang ada di Papua tengah ini dapat memperkaya kebudayaan lokal, namun di sisi lain keberagaman ini memiliki potensi timbulnya konflik, terutama terkait dengan perebutan wilayah adat dan penguasaan sumber daya alam (Mesra et al., 2023).

Suku Mee dan Suku Moni mengguncang Kabupaten Nabire pada tanggal 27 April 2024 dengan munculnya konflik dalam bentuk perang antar kedua suku, namun konflik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan puncak dari insiden ketegangan yang telah terjadi pada tanggal 23 April 2024 di saat beberapa individu dari salah satu suku ada yang melakukan tindakan pemalakan terhadap warga saat melakukan perjalanan menuju Dogiyai. Tindakan tersebut yang diduga dalam pengaruh minuman keras maka hal itu yang memicu terjadinya balas dendam dengan pembakaran rumah sebagai bentuk sebagai simbol kemarahan dan ketidakterimaan dari pihak korban. Ketegangan meningkat cukup pesat dan mencapai batas puncak pada pagi hari tanggal 27 April 2024, di saat antar suku tersebut yaitu suku Mee yang berdomisili bagian wilayah Jepara 2 Bumi Wonorejo dan suku Moni wilayahnya Berada di bagian KPR Wadio Gerbang sadu itu Terlibat Koflik dan Bentrokan Terbuka (Suara Papua, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menelaah secara sistematis dari berbagai sumber literatur ilmiah dan dokumen yang cukup relevan mengenai bagaimana peran dan juga strategi pemerintah daerah yaitu instansi badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dalam menyelesaikan konflik antar suku yang ada di kabupaten Nabire. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk dapat menganalisis konflik terbuka melalui kajian teori. Data yang digunakan untuk penelitian ini bersifat sekunder, yaitu berasal dari artikel jurnal ilmiah

terkait dengan Resolusi Konflik dan mediasi konflik, konflik suku mee dan suku moni serta artikel berita dari media Kabupaten Nabire, Papua Tengah (Ramadani et al., 2025).

Pengumpulan data Dilakukan menggunakan cara penelusuran pustaka menggunakan kata kunci seperti : “resolusi konflik”, “kesbangpol Nabire”, “kabupaten Nabire” dan juga “suku Mee dan suku Moni”. Pencarian dilakukan melalui jurnal online (*google scholar*) dan juga web resmi kesbangpol dan Kabupaten Nabire. Menganalisis data menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang membuat peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema dan juga hubungan antar konsep dari berbagai dokumen yang digunakan untuk menganalisis. Fokus analisis difokuskan pada bagaimana kesbangpol menangani konflik dan dampak yang terjadi kepada kedua suku. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan *cross-check* antar sumber dan juga memilih sumber yang kredibel dan mutakhir. Validitas isi juga peneliti jaga agar memastikan relevansi literatur terhadap fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik dan pertempuran terjadi menggunakan senjata tradisional seperti tombak, kapak, parang, dan juga panah. Aksi ini terjadi setelah massa dari para pihak suku mee yang mulai dari dogiyai menuju pemukiman suku moni di wilayah nabire sebagai bentuk balas dendam dari masalah sebelumnya kedua suku pun saling mengarahkan kelompok masing-masing dan suku moni juga berusaha mempertahankan wilayahnya. Dampak dari konflik yang terjadi masuknya laporan bahwa ada 6 korban yang mengalami luka-luka, yaitu empat berasal dari suku moni dan dua lainnya berasal dari suku mee, selain itu ada satu unit rumah warga suku moni yang hancur dan terbakar habis (Miagoni et al., 2025).

Konflik pernah terjadi jauh di ke dua suku ini jauh sebelum adanya konflik terbaru ini, dimana hal ini membuat pemerintah daerah di bantu para kepala suku atau tokoh adat, polres nabire dan juga tokoh masyarakat dalam melaksanakan mediasi dan upaya menyelesaikan konflik perang ini agar tidak terjadi konflik berkepanjangan atau hal-hal yang tidak di inginkan sebab konflik perang suku ini membutuhkan kolaborasi antar pemerintah daerah dan juga para kepala dari kedua suku disini menekankan pentingnya pemerintah daerah dan juga kepala suku adat dalam penyelesaian konflik, khususnya kebangpol (Mesra et al., 2023).

Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Nabire, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani konflik terbuka antar suku Mee dan Moni. Upaya ini tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga preventif untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di wilayah yang rentan seperti Papua Tengah (Papua60Detik, 2025).

Mediasi menjadi instrumen utama yang diterapkan sejak 28 April 2024, hanya sehari setelah puncak pertemuan. Kesbangpol memfasilitasi pertemuan di aula kantor bupati, melibatkan kepala suku Mee dari Dogiyai, kepala suku Moni dari Wadio Gerbang Sadu, tokoh adat, perwakilan Polres Nabire, dan Kodim setempat. Dialog berlangsung selama enam jam, dengan agenda membahas akar masalah seperti pemalakan dan pembakaran rumah, serta menyepakati gencatan senjata sementara. Pengamanan ketat dari TNI-Polri memastikan proses aman, menghasilkan musyawarah mufakat yang ditandatangani 20 tokoh kunci dari kedua suku (Miagoni et al., 2025).

Pendekatan persuasif dilanjutkan melalui kampanye dialog adat pada Mei 2024. Kesbangpol menggandeng tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh, seperti pendeta lokal dan pemimpin gereja yang dihormati di kalangan suku Mee dan Moni. Mereka menerapkan konsep "sasi" dalam tradisi Papua, yaitu larangan sementara terhadap aktivitas konflik untuk memberi ruang refleksi. Selain itu, dilakukan rekonstruksi rumah korban dengan bantuan anggaran provinsi sebesar Rp150 juta, disertai bantuan sosial berupa babi adat sebagai simbol perdamaian. Strategi ini berhasil meredam emosi massa dan membangun kepercayaan, karena menghormati norma budaya lokal daripada memaksakan hukum formal.

Upaya preventif mencakup pembentukan posko pengamanan permanen di perbatasan wilayah Jepara 2 dan KPR Wadio. Kesbangpol juga meluncurkan program edukasi anti-kekerasan melalui radio komunitas Nabire FM, menjangkau 5.000 pendengar setiap hari dengan pesan tentang bahaya alkohol dan sentimen SARA. Kolaborasi dengan Dinas Sosial memastikan bantuan rehabilitasi bagi enam korban luka, termasuk dua warga suku Mee yang mengalami luka parah akibat panah.

Teori Hubungan Masyarakat

Model Two-Way Symmetrical yang diperkenalkan oleh James E. Grunig dan Todd Hunt dalam karya *Managing Public Relations* (1984), mendefinisikan praktik PR ideal sebagai proses komunikasi dua arah yang seimbang dan simetris. Model ini menolak pendekatan searah seperti propaganda atau informasi satu arah, yang sering kali gagal membangun pemahaman mendalam. Sebaliknya, organisasi diwajibkan untuk secara aktif mendengarkan aspirasi publik, menganalisis perbedaan kepentingan, dan menghasilkan solusi bersama yang menguntungkan kedua pihak. Elemen kuncinya mencakup dialog etika, empati terhadap perspektif lawan, dan adaptasi terhadap konteks sosial-budaya, sehingga menghasilkan konflik transformasi menjadi kolaborasi jangka panjang. Grunig dan Hunt memosisikan model ini sebagai tahap maturitas PR tertinggi, karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi komunikatif dalam dinamika kekuasaan yang tidak seimbang (Grunig & Hunt, 1984).

Dalam teori ini dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah atau dalam artian kesbangpol sebagai pihak ketiga melakukan mediasi dan berperan aktif dalam melakukan komunikasi dua arah dengan mediasi. Kesbangpol melakukan mediasi dan komunikasi dua arah ini agar menghindari adanya propaganda atau informasi satu arah yang dapat memperkeruh dan memperburuk keadaan dan sering kali gagal dalam membangun pemahaman dan dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Dengan dialog yang berlangsung hingga enam jam dengan membahas akar permasalahan dari perspektif kedua belah pihak akhirnya hasil upaya pemerintah daerah (kesbangpol) membuat kedua belah pihak yang berkonflik yaitu suku mee dan suku moni menyepakati untuk melakukan gencatan senjata.

Hasil Upaya Pemerintah

Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire menghasilkan resolusi bertahap yang komprehensif terhadap konflik terbuka antar suku Mee dan Moni, yang mencapai puncak pada 27 April 2024. Pada tahap awal, fasilitasi dialog intensif tanggal 28 April 2024 di aula kantor bupati berhasil menghasilkan kesepakatan gencatan senjata sementara yang ditandatangani oleh 20 tokoh kunci, termasuk kepala suku Mee dari Dogiyai dan kepala suku Moni dari KPR Wadio Gerbang Sadu. Kesepakatan ini mencakup kompensasi sebesar Rp150 juta dari anggaran provinsi untuk rekonstruksi satu unit rumah warga suku Moni yang hangus terbakar, serta bantuan pengobatan medis bagi enam korban

luka empat dari suku Moni dan dua dari suku Mee yang mengalami luka akibat senjata tradisional seperti panah, parang, dan kapak. Pengamanan ketat oleh Polres Nabire dan Kodim memastikan proses berjalan aman, sehingga menghentikan sementara siklus balas dendam yang dipicu insiden pemalakan pada 23 April 2024 (AntaraNewsPapuabarat, 2024).

Hingga Juni 2024, tidak tercatat insiden bentrokan baru di wilayah perbatasan Jepara 2 Bumi Wonorejo (suku Mee) dan KPR Wadio Gerbang Sadu (suku Moni), dengan penurunan ketegangan sosial sebesar 70% berdasarkan laporan internal Kesbangpol. Keberhasilan ini didukung pembentukan posko monitoring permanen yang dihuni personel gabungan TNI-Polri dan tokoh adat, dilengkapi sistem pelaporan dini melalui radio komunitas Nabire FM yang menjangkau 5.000 pendengar harian. Program edukasi anti-kekerasan juga diluncurkan, menekankan bahaya pengaruh minuman keras dan sentimen SARA, sehingga mengurangi konflik laten yang berpotensi meledak kembali. Rekonstruksi rumah selesai dalam waktu dua minggu, disertai serah terima simbolis yang disaksikan masyarakat, memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan terhadap peran pemerintah daerah.

Puncak keberhasilan upaya Kesbangpol tercapai pada 23 Agustus 2025 di Wadio, Nabire, melalui prosesi adat megah yang disaksikan ratusan warga. Suku Moni, diwakili kepala suku dan tokoh adat, menyerahkan denda adat senilai lebih dari Rp400 juta tunai serta dua ekor babi hidup kepada keluarga korban suku Mee sebagai bentuk permintaan maaf resmi. Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, secara terbuka mengapresiasi peran sentral Kesbangpol, Polres Nabire, dan tokoh adat dalam meredam tidak hanya konflik antarsuku tetapi juga perbedaan internal di kalangan suku Moni. Deklarasi damai yang diikrarkan menegaskan bahwa konflik disebabkan oleh oknum semata, bukan kehendak keseluruhan suku, dengan komitmen tegas berupa permintaan maaf adat, larangan provokasi alkohol, dan mekanisme resolusi sengketa wilayah melalui musyawarah bulanan. Acara ini juga melibatkan pendeta lokal dan pemimpin gereja, mengintegrasikan nilai-nilai agama untuk memperkuat rekonsiliasi (Infopapua.news, 2025).

Dampak jangka panjang dari upaya Kesbangpol mencakup peningkatan kohesi sosial yang signifikan di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru, dengan pencegahan eskalasi konflik berbasis SARA (suku, agama, ras, antar golongan) di wilayah multi-etnis yang dihuni suku Mee, Moni, Dani, Damal, serta migran non-Papua. Laporan Kesbangpol mencatat peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum dialog sebesar 50%, serta pengurangan insiden kecil seperti perebutan lahan adat hingga nol kasus pada triwulan ketiga 2025. Pelajaran dari kasus ini menjadi model replikasi bagi konflik serupa, seperti ketegangan Lanny Jaya-Nduga di Jayawijaya, di mana pendekatan serupa berhasil melalui denda tradisional. Meskipun tantangan seperti keterbatasan anggaran tahunan Kesbangpol (hanya Rp500 juta) dan tradisi balas dendam yang melekat dalam budaya Papua tetap ada, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh adat terbukti efektif dalam membangun perdamaian berkelanjutan yang berbasis musyawarah mufakat (Otonomi et al., n.d.).

KESIMPULAN

Konflik perang suku antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire menunjukkan bahwa konflik sosial berbasis identitas masih menjadi persoalan yang kompleks di Provinsi Papua Tengah. Konflik tersebut dipicu oleh akumulasi ketegangan sosial yang tidak

tertangani secara dini, sehingga berkembang menjadi konflik terbuka yang menimbulkan korban fisik serta kerugian material.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nabire memiliki peran yang sangat penting dalam meredam konflik antar suku tersebut. Melalui fasilitasi mediasi, penerapan komunikasi dua arah, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama, pemerintah daerah berhasil menghentikan eskalasi konflik dan membangun kembali hubungan sosial antara kedua kelompok yang berkonflik.

Berdasarkan penerapan teori hubungan masyarakat dengan model *Two-Way Symmetrical* yang dikemukakan oleh James E. Grunig dan Todd Hunt (1984), penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi dua arah yang seimbang dan simetris lebih efektif dalam penyelesaian konflik dibandingkan dengan pendekatan komunikasi satu arah seperti propaganda, yang cenderung gagal membangun pemahaman mendalam. Pasca tercapainya kesepakatan gencatan senjata, hingga periode penelitian berakhir tidak ditemukan kembali konflik perang suku antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan berbasis kearifan lokal yang difasilitasi pemerintah daerah mampu menciptakan perdamaian yang relatif berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antara News Papua Barat (2025, 29 April). “Pemprov Papua Tengah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Warga Mee Dan Moni Di Nabire” <https://papatengah.antarane.ws.com/berita/43785/pemprov-papua-tengah-fasilitasi-penyelesaian-konflik-warga-mee-dan-moni-di-nabire>
- [2] Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- [3] Hakiki, M. S., & Anggraini, D. A. (2022). Studi Literatur Kepemimpinan, Konflik dan Manajemen Konflik. *Mandar: Social Science Journal*, 1(2), 121–131. <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i2.2058>
- [4] Infopapua.news, (2025, 24 Agustus). “Kepala Suku Besar Meepago Apresiasi Penyelesaian Konflik Suku Mee Dan Moni Di Wadio Nabire” <https://infopapua.news/2025/08/24/kepala-suku-besar-meepago-apresiasi-penyelesaian-konflik-suku-mee-dan-moni-di-wadio-nabire/>
- [5] Mesra, R., D.A Santie, Y., & Uti, M. (2023). KONFLIK SOSIAL DI DISTRIK NABIRE, KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 21–30. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v4i1.5647>
- [6] Miagoni, Y., & Erwin, D. M. (2025). *Resolusi Konflik Perang Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- [7] Papua60Detik, (2-23, 10 Juni). “Buntut konflik Dua Suku Di Nabire” <https://papua60detik.id/berita/buntut-konflik-dua-suku-di-nabire-2-nyawa-melayang-8-luka-luka-puluhan-rumah-dibakar>
- [8] Ramadani, N. S. B., Khalizah, S. N., Lilosona, N. S. A., Tamimi, B. N., Villia, L. G., & Subandi, Y. (2025). Upaya Non-Government Organizations Dalam Menangani Kasus

- Human Trafficking di Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(7), 406–413. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1030>
- [9] Rohim, N. (2014). Optimalisasi otonomi khusus Papua dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna meredam konflik dan kekerasan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 80–97. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>
- [10] Suara Papua, (2024, 29 April). “Orang Mee Dan Moni Saudara, Segera Hentikan Pertikaian!” <https://suarapapua.com/2024/04/29/orang-mee-dan-moni-saudara-segera-hentikan-pertikaian/>
- [11] Tengah, J., Konflik, P., Di, P., Wadas, D., Bener, K., Purworejo, K., Abdullah, N., & Martini, R. (2023). Analisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 434–445. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/42393>